

---

**Pengawasan Lembaga Advokasi Terhadap Kasus Pidana Dapat Meningkatkan Akuntabilitas Dalam Sistem Peradilan**

*Supervision Of Advocacy Agencies On Criminal Cases Can Increase Accountability In The Justice System*

**Fatri Sagita, Hasan Basri**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
Email: Fatrisagita@stainmajene.ac.id, hbasri@stainmajene.ac.id

**Abstrak**

Artikel ini membahas peran penting lembaga advokasi dalam pengawasan kasus pidana dan dampaknya terhadap akuntabilitas sistem peradilan. Dengan melakukan monitoring yang ketat terhadap proses hukum, lembaga advokasi berkontribusi dalam menciptakan transparansi, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota lembaga advokasi, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, dokumentasi laporan pengawasan dan catatan kasus pidana yang telah diobservasi oleh lembaga advokasi juga dianalisis. Melalui analisis kasus dan pengumpulan data, artikel ini menunjukkan bahwa pengawasan lembaga advokasi tidak hanya menyoroti kekurangan dalam sistem hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga advokasi dan sistem peradilan untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua pihak.

Kata Kunci : Pengawasan Lembaga Advokasi; Kasus Pidana; Akuntabilitas Sistem Peradilan

**Abstract**

*This article discusses the important role of advocacy agencies in the supervision of criminal cases and their impact on the accountability of the justice system. By conducting strict monitoring of the legal process, advocacy agencies contribute to creating transparency, protecting human rights, and increasing public trust in the justice system. The method used in this study is a qualitative approach with case studies. Data was collected through interviews with members of advocacy agencies, law enforcement officials, and other related parties. In addition, documentation of supervision reports and records of criminal cases that advocacy institutions have observed are also analyzed. Through case analysis and data collection, this article shows that the supervision of advocacy agencies not only highlights shortcomings in the legal system but also provides recommendations for improvement that law enforcement officials can implement. The results of this study emphasize the importance of collaboration between advocacy institutions and the justice system to achieve better justice for all parties.*

*Keywords: Supervision of Advocacy Institutions; Criminal Cases; Accountability of the Justice System*

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana memiliki peran yang krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Sebagai ujung tombak penegakan hukum, sistem ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai kasus pidana yang terjadi dalam masyarakat<sup>1</sup>. Keadilan yang ditegakkan oleh sistem peradilan tidak hanya mencerminkan integritas hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Ketika masyarakat merasa sistem peradilan berfungsi dengan baik, kepercayaan terhadap hukum dan aparat penegak hukum akan meningkat<sup>3</sup>. Namun, tantangan besar sering kali mengganggu tujuan mulia ini, menyebabkan banyak individu merasa dirugikan oleh proses hukum yang seharusnya melindungi mereka.

Namun, berbagai masalah sering kali ditemukan dalam praktik sistem peradilan pidana, yang menghambat efektivitasnya. Di antara masalah yang paling signifikan adalah pelanggaran hak asasi manusia, yang dapat terjadi pada setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan<sup>4</sup>. Ketidakadilan dalam proses hukum juga sering kali muncul, di mana pihak-pihak tertentu mendapatkan perlakuan istimewa, sementara yang lain mengalami diskriminasi.<sup>5</sup> Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses hukum dapat menciptakan ketidakpastian dan keraguan di kalangan masyarakat tentang keadilan yang dijalankan oleh sistem peradilan<sup>6</sup>. Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik di dalam sistem peradilan.

---

<sup>1</sup> Estrella Pearce, "Criminal Justice System," in *The Blackwell Encyclopedia of Sociology* (Wiley, 2024), 1–5, <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosc159.pub2>.

<sup>2</sup> Karla Sapp, "Policy Reform: Rethinking Criminal Justice," 2024, 53–66, [https://doi.org/10.1007/978-3-031-50678-9\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-031-50678-9_4).

<sup>3</sup> THALLURU PADMAJA -, "Criminal Justice System in India," *International Journal For Multidisciplinary Research* 5, no. 5 (October 17, 2023), <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i05.7590>.

<sup>4</sup> "ADDRESSING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF KAZAKHSTAN: THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE AND A CALL FOR LEGISLATIVE REFORMS," *Access to Justice in Eastern Europe* 7, no. 3 (August 5, 2024): 63–90, <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-7.3-a000323>.

<sup>5</sup> Derry Angling Kesuma, "Criminal Law Reform to Increase the Effectiveness of the Justice System in Overcoming Crime," *International Journal of Science and Society* 6, no. 1 (February 6, 2024): 760–69, <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i1.1061>.

<sup>6</sup> Laurensia Putri, "Effectiveness and Study of the Criminal Law Pretrial System," *Enigma in Law* 1, no. 1 (November 7, 2023): 21–25, <https://doi.org/10.61996/law.v1i1.15>.

Dalam konteks ini, lembaga advokasi muncul sebagai entitas yang berfungsi untuk mengawasi dan memantau kasus-kasus pidana. Lembaga ini berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem peradilan, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu yang mungkin terabaikan<sup>7</sup>. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, lembaga advokasi mampu menyoroiti praktik-praktik tidak adil dan memberikan suara bagi korban yang sering kali tidak memiliki akses keadilan.<sup>8</sup> Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga advokasi mencakup pemantauan proses hukum, pengumpulan data kasus, dan pembuatan laporan yang menyuarakan kondisi aktual yang terjadi di lapangan.<sup>9</sup>

Melalui pengawasan ini, lembaga advokasi bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.<sup>10</sup> Akuntabilitas ini sangat penting, karena menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum—baik itu penegak hukum, jaksa, maupun hakim—bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.<sup>11</sup> Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan akan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua individu yang terlibat dalam sistem peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengawasan lembaga advokasi dapat berkontribusi pada akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dengan menganalisis berbagai kasus dan pengalaman lembaga advokasi dalam pengawasan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai efektivitas pengawasan tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih

---

<sup>7</sup>I.V. Bondar, O.P. Kuchynska, and Yu.V. Tsyganyuk, "Advocate in Criminal Proceedings: Organizational and Legal Principles," *Analytical and Comparative Jurisprudence*, no. 4 (September 14, 2023): 524–28, <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.83>.

<sup>8</sup>Siraj ul haq, "Fighting for Fairness: Advocacy and Activism in Criminal Justice Reform," April 18, 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/6bj4w>.

<sup>9</sup>Shawn S. Sidhu et al., "Advocacy in Action: An Interactive Workshop on Providing Asylum Evaluations for Children and Families Fleeing Torture and Persecution," *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry* 62, no. 10 (October 2023): S416, <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2023.07.954>.

<sup>10</sup>Topan Oddye Prastyo Sunaryo et al., "Legal Certainty Advocate Organizational System Arrangements in the Implementation of Professional Quality with the Value of Justice," *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 2 (May 14, 2024): e5762, <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n2-115>.

<sup>11</sup>Dwi Asmoro and Riswadi Riswadi, "Legal Deliberation and Police Reform to Increase Transparency and Accountability in Law Enforcement," *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 6 (June 22, 2024): 337–44, <https://doi.org/10.57096/edunity.v3i6.248>.

transparan, adil, dan akuntabel. Melalui upaya kolaboratif antara lembaga advokasi dan sistem peradilan, diharapkan keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh, memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **B. Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota lembaga advokasi, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, dokumentasi laporan pengawasan dan catatan kasus pidana yang telah diobservasi oleh lembaga advokasi juga dianalisis. Penelitian ini mencakup kasus-kasus yang relevan di beberapa wilayah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh pengawasan lembaga advokasi terhadap akuntabilitas sistem peradilan.

## **II. Pembahasan**

### **Peran Lembaga Advokasi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Peradilan Pidana**

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kasus pidana yang diawasi oleh lembaga advokasi, ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh lembaga advokasi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Lembaga advokasi berperan sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, lembaga advokasi berhasil mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan dalam proses hukum, dan kurangnya transparansi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Contoh kasus yang dianalisis adalah kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum penegak hukum dalam proses penyidikan. Lembaga advokasi berhasil mengungkap praktik-praktik tidak transparan, seperti pemalsuan bukti dan intimidasi terhadap saksi. Dengan adanya laporan dan rekomendasi dari lembaga advokasi, kasus tersebut mendapatkan perhatian lebih dari publik dan otoritas yang berwenang, sehingga memaksa aparat penegak hukum untuk bertindak lebih akuntabel.

Pengawasan oleh lembaga advokasi terbukti efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses hukum dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas<sup>12</sup>. Dengan melakukan pemantauan secara aktif, lembaga advokasi dapat mengidentifikasi serta melaporkan berbagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, baik yang bersifat sistemik maupun individual<sup>13</sup>. Dalam banyak kasus, pengawasan ini membantu menciptakan dorongan untuk perbaikan dalam sistem hukum yang ada. Transparansi yang dihasilkan dari pengawasan ini memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami proses hukum dan mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi.<sup>14</sup> Masyarakat yang mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses hukum akan lebih mampu memberikan dukungan dan advokasi untuk hak-hak mereka. Ini bukan hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas sistem peradilan<sup>15</sup>. Melalui pelibatan aktif, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada keadilan sosial.

Selain itu, kolaborasi antara lembaga advokasi dan aparat penegak hukum juga dapat mengarah pada peningkatan kebijakan dan prosedur yang lebih baik. Ketika kedua entitas ini bekerja sama, mereka dapat menciptakan mekanisme pemantauan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi lembaga advokasi, tetapi juga bagi aparat penegak hukum dalam memperbaiki praktik kerja mereka.<sup>16</sup> Dengan menerima umpan balik dari lembaga advokasi, aparat penegak hukum dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang ada untuk menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya menjadi hambatan signifikan dalam efektivitas pengawasan lembaga

---

<sup>12</sup> Ramisha Shahid, "Fair Trials and Victim Reparations: Improving Judicial Oversight," June 11, 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/u984w>.

<sup>13</sup> Asad Abbas, "Enhancing Judicial Oversight: Fair Trials and Remedies for Victims," May 27, 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/8efwz>.

<sup>14</sup> Eli Y. Adashi, "Transparency in Action: 'The Imperfect Is Our Paradise,'" *JAMA* 312, no. 24 (December 24, 2014): 2607, <https://doi.org/10.1001/jama.2014.14752>.

<sup>15</sup> Jyri Rajamaki et al., "How Transparency Improves the Control of Law Enforcement Authorities' Activities?," in *2012 European Intelligence and Security Informatics Conference (IEEE, 2012)*, 14–21, <https://doi.org/10.1109/EISIC.2012.35>.

<sup>16</sup> AKBP. Nur Ichsan Dwi Septiyanto et al., "Developing Policy and Regulation Using Collaborative Governance to Enhance Democratic Policing," *International Journal of Religion* 5, no. 11 (June 13, 2024): 742–60, <https://doi.org/10.61707/g76rtz26>.

advokasi<sup>17</sup>. Banyak lembaga advokasi beroperasi dengan dana yang terbatas, yang menghambat kapasitas mereka untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh dan mendalam. Keterbatasan ini dapat menyebabkan beberapa kasus penting terlewatkan atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup.<sup>18</sup> Oleh karena itu, penting bagi lembaga advokasi untuk mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas mereka secara optimal.

Resistensi dari aparat penegak hukum juga menjadi tantangan yang signifikan. Dalam beberapa kasus, lembaga advokasi mungkin menghadapi penolakan atau bahkan intimidasi dari aparat penegak hukum yang merasa terancam dengan pengawasan yang dilakukan<sup>19</sup>. Hal ini bisa menghambat pengawasan yang efektif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga advokasi. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi lembaga advokasi untuk membangun hubungan yang konstruktif dengan aparat penegak hukum, berlandaskan pada komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Stigma sosial terhadap lembaga advokasi juga dapat mengurangi efektivitas pengawasan.<sup>20</sup> Masyarakat kadang-kadang melihat lembaga advokasi sebagai entitas yang berkonfrontasi dengan aparat penegak hukum, padahal tujuan utama mereka adalah menciptakan keadilan dan transparansi. Edukasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi lembaga advokasi sangat penting untuk mengubah persepsi negatif ini. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya lembaga advokasi dalam menjaga akuntabilitas sistem peradilan dapat membantu mengurangi stigma sosial dan meningkatkan dukungan masyarakat.

Pengawasan yang efektif juga dapat menghasilkan data dan laporan yang dapat digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan. Lembaga advokasi memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai kasus-kasus yang mereka awasi. Data ini bisa menjadi dasar

---

<sup>17</sup> Laurie P. Whitsel et al., "Policy Implementation and Outcome Evaluation: Establishing a Framework and Expanding Capacity for Advocacy Organizations to Assess the Impact of Their Work in Public Policy," *Health Research Policy and Systems* 22, no. 1 (February 20, 2024): 27, <https://doi.org/10.1186/s12961-024-01110-0>.

<sup>18</sup> Sonya Buffone et al., "Improving the Police Complaints System: Stakeholder Collaboration as a Vehicle for Systems Change," *American Journal of Criminal Justice* 42, no. 2 (June 15, 2017): 293–313, <https://doi.org/10.1007/s12103-016-9360-8>.

<sup>19</sup> Viviana Andreescu and David Kim, "Drivers of Police Agencies' Resistance to Body-Worn Camera Adoption," *International Journal of Police Science & Management* 24, no. 4 (December 27, 2022): 437–52, <https://doi.org/10.1177/14613557221126492>.

<sup>20</sup> Nadia Ghaffari, "Surveillance And Resistance: Police Use of Technology and Activist Mobilization in the San Francisco Bay Area," *Berkeley Undergraduate Journal* 37, no. 1 (September 18, 2023), <https://doi.org/10.5070/B337162076>.

bagi rekomendasi perubahan kebijakan yang dapat disampaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait. Dengan cara ini, lembaga advokasi tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang proaktif dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih baik. Lebih jauh lagi, peran lembaga advokasi dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka sangat penting. Melalui program-program sosialisasi dan pelatihan, lembaga advokasi dapat membantu masyarakat memahami bagaimana cara melindungi hak-hak mereka di hadapan hukum. Peningkatan pengetahuan ini akan memberdayakan individu untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses hukum dan mendorong mereka untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi masalah dalam sistem peradilan. Dengan semua tantangan yang ada, kolaborasi antara lembaga advokasi, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas menjadi semakin penting. Melalui kerja sama yang erat, diharapkan dapat tercipta sinergi yang memperkuat sistem peradilan. Upaya kolektif ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana keadilan dapat ditegakkan secara lebih konsisten dan efektif. Keterlibatan berbagai pihak akan memberikan dampak positif yang lebih besar dibandingkan jika masing-masing beroperasi secara terpisah.

Akhirnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lembaga advokasi dalam sistem peradilan, diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga advokasi harus bersinergi untuk menciptakan sistem peradilan yang akuntabel, transparan, dan adil. Hanya dengan pendekatan yang kolaboratif, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan dan diperkuat, sehingga keadilan dapat terwujud bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **Dampak Pengawasan Lembaga Advokasi terhadap Transparansi dan Keadilan**

Pengawasan oleh lembaga advokasi secara signifikan meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan dengan memantau proses hukum dengan cermat dan mengekspos penyimpangan. Misalnya, lembaga advokasi telah memainkan peran penting dalam mengungkap intervensi politik yang membahayakan ketidakberpihakan yudisial, sebagaimana dibuktikan dalam persidangan korupsi di mana temuan mereka mendorong penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas terkait, seperti

Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>21</sup> Pengawasan ini sejalan dengan kerangka tata kelola yang lebih luas, yang menekankan akuntabilitas dan daya tanggap di lembaga-lembaga publik, termasuk peradilan.<sup>22</sup> Selain itu, integritas advokat, sebagaimana diuraikan dalam kerangka hukum, sangat penting untuk mempertahankan standar etika dan memastikan bahwa praktik advokasi berkontribusi positif terhadap sistem hukum.<sup>23</sup> Dengan demikian, interaksi antara pengawasan advokasi dan transparansi peradilan sangat penting untuk menumbuhkan lingkungan hukum yang adil dan akuntabel di Indonesia.

Selain itu, pengawasan lembaga advokasi juga membantu memastikan bahwa hak-hak korban dan tersangka dilindungi. Dalam beberapa kasus, lembaga advokasi memberikan pendampingan hukum kepada korban yang tidak memiliki akses ke sumber daya hukum yang memadai. Hal ini tidak hanya membantu korban mendapatkan keadilan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

### **Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan**

Meskipun memiliki peran yang penting, lembaga-lembaga ini sering menghadapi intimidasi dan ancaman hukum dari pihak-pihak yang dirugikan oleh pengawasan mereka, yang mencerminkan konteks yang lebih luas dari perlawanan politik dan perpecahan masyarakat yang merusak advokasi hak asasi manusia.<sup>24</sup> Kurangnya kemauan politik dan koordinasi di antara entitas pemerintah semakin memperumit situasi, seperti yang terlihat di berbagai sektor, termasuk pengendalian tembakau, di mana kepentingan yang saling bertentangan menghambat

---

<sup>21</sup> Muhammad Fachrur Rozi, "ANALYSIS OF THE FUNCTION OF THE PROSPERITY'S COMMISSION IN SUPERVISING THE BEHAVIOR OF PROSPECTORS IN INDONESIA," *NOMOI Law Review* 4, no. 1 (May 30, 2023): 128–41, <https://doi.org/10.30596/nomoi.v4i1.14948>.

<sup>22</sup> Rina Elsa Rizkiana and Michael Gerry, "The Implementation of Good Governance Concept In Letter Evidence Submission Regulation For E-Litigation Cases," *Veteran Law Review* 6, no. 1 (May 30, 2023): 48–60, <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i1.4843>.

<sup>23</sup> Handa S. Abidin and Arya F. Sultansyah, "Building Integrity in Law Students Before They Become Lawyers in Indonesia," *Asian Journal of Legal Education* 10, no. 2 (July 1, 2023): 140–51, <https://doi.org/10.1177/23220058231181166>.

<sup>24</sup> Yoan Barbara Runtuuwu and Indra Tjahyadi, "Promoting Economic, Social, and Cultural Rights: Challenges and Opportunities in International Human Rights Law," *The Easta Journal Law and Human Rights* 1, no. 03 (June 30, 2023): 158–65, <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.92>.

implementasi kebijakan.<sup>25</sup> Selain itu, kerangka hukum seputar hak asasi manusia, terutama dalam melindungi populasi rentan seperti anak-anak dari perdagangan manusia, tetap tidak memadai, memerlukan peraturan yang lebih ketat dan perlindungan yang lebih jelas.<sup>26</sup> Faktor-faktor ini secara kolektif menggambarkan lingkungan genting di mana lembaga advokasi beroperasi, membatasi kapasitas mereka untuk mempromosikan akuntabilitas dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia secara efektif. Perlu juga ada konsep profetik dalam menjelaskan peran Lembaga advokasi dalam penanganan perkara pidana, Dalam melaksanakan penegakan hukum profetik ini, para pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan pengalaman, pandangan, dan budaya masyarakat yang terdampak. Proses penyelesaian sengketa ini harus mencerminkan kearifan lokal dan kepekaan terhadap konteks sosial yang ada.<sup>27</sup>

Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia. Banyak lembaga advokasi yang bergantung pada pendanaan dari donor, sehingga aktivitas mereka sering kali terhambat oleh ketidakpastian pendanaan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga advokasi dan aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam upaya meningkatkan akuntabilitas sistem peradilan.

---

### III. Penutup

#### Kesimpulan

Pengawasan lembaga advokasi terhadap kasus pidana memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas sistem peradilan. Dengan melakukan monitoring yang efektif, lembaga advokasi tidak hanya menyoroti kekurangan dalam proses hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan. Kolaborasi antara lembaga advokasi, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang

---

<sup>25</sup> Putu Ayu Swandewi Astuti, "Policy Incoherence and Unwillingness of the Indonesian Government to Curb Its Alarming Tobacco Epidemic," *Tobacco Control* 32, no. 4 (July 1, 2023): 405–6, <https://doi.org/10.1136/tc-2023-058114>.

<sup>26</sup> Gregorius Hari Saputra, "ANALISIS YURDIS PUTUSAN NO.101/Pid.B/2014/PN Rap TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG," *College Student Journal*, June 30, 2023, <https://doi.org/10.56301/cs.j.v6i1.860>.

<sup>27</sup> Ardiansyah, Ardiansyah. "Enforcement of Prophetic Law in Settlement of Land Cases in Indonesia." *Available at SSRN 4956207* (2024).

lebih transparan dan adil. Keberhasilan advokasi hukum dalam meningkatkan akuntabilitas akan berdampak positif pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk mendukung lembaga advokasi dalam pengawasan kasus pidana harus menjadi prioritas dalam reformasi sistem peradilan.

### **Daftar Pustaka**

- Abbas, Asad. "Enhancing Judicial Oversight: Fair Trials and Remedies for Victims," May 27, 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8efwz>.
- Abidin, Handa S., and Arya F. Sultansyah. "Building Integrity in Law Students Before They Become Lawyers in Indonesia." *Asian Journal of Legal Education* 10, no. 2 (July 1, 2023): 140–51. <https://doi.org/10.1177/23220058231181166>.
- Adashi, Eli Y. "Transparency in Action: 'The Imperfect Is Our Paradise.'" *JAMA* 312, no. 24 (December 24, 2014): 2607. <https://doi.org/10.1001/jama.2014.14752>.
- Ardiansyah, Ardiansyah. "Enforcement of Prophetic Law in Settlement of Land Cases in Indonesia." *Available at SSRN 4956207* (2024).
- "ADDRESSING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF KAZAKHSTAN: THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE AND A CALL FOR LEGISLATIVE REFORMS." *Access to Justice in Eastern Europe* 7, no. 3 (August 5, 2024): 63–90. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-7.3-a000323>.
- Andreescu, Viviana, and David Kim. "Drivers of Police Agencies' Resistance to Body-Worn Camera Adoption." *International Journal of Police Science & Management* 24, no. 4 (December 27, 2022): 437–52. <https://doi.org/10.1177/14613557221126492>.
- Asmoro, Dwi, and Riswadi Riswadi. "Legal Deliberation and Police Reform to Increase Transparency and Accountability in Law Enforcement." *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 6 (June 22, 2024): 337–44. <https://doi.org/10.57096/edunity.v3i6.248>.
- Astuti, Putu Ayu Swandewi. "Policy Incoherence and Unwillingness of the Indonesian Government to Curb Its Alarming Tobacco Epidemic." *Tobacco Control* 32, no. 4 (July 1, 2023): 405–6. <https://doi.org/10.1136/tc-2023-058114>.
- Bondar, I.V., O.P. Kuchynska, and Yu.V. Tsyganyuk. "Advocate in Criminal Proceedings: Organizational and Legal Principles." *Analytical and Comparative Jurisprudence*, no. 4 (September 14, 2023): 524–28. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.83>.
- Buffone, Sonya, Allison Chenier, Jennifer L. Schulenberg, and Damian Sycz. "Improving the Police Complaints System: Stakeholder Collaboration as a Vehicle for Systems Change." *American Journal of Criminal Justice* 42, no. 2 (June 15, 2017): 293–313. <https://doi.org/10.1007/s12103-016-9360-8>.

- Ghaffari, Nadia. "Surveillance And Resistance: Police Use of Technology and Activist Mobilization in the San Francisco Bay Area." *Berkeley Undergraduate Journal* 37, no. 1 (September 18, 2023). <https://doi.org/10.5070/B337162076>.
- haq, siraj ul. "Fighting for Fairness: Advocacy and Activism in Criminal Justice Reform," April 18, 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6bj4w>.
- Kesuma, Derry Angling. "Criminal Law Reform to Increase the Effectiveness of the Justice System in Overcoming Crime." *International Journal of Science and Society* 6, no. 1 (February 6, 2024): 760–69. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i1.1061>.
- Pearce, Estrella. "Criminal Justice System." In *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, 1–5. Wiley, 2024. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosc159.pub2>.
- Putri, Laurensia. "Effectiveness and Study of the Criminal Law Pretrial System." *Enigma in Law* 1, no. 1 (November 7, 2023): 21–25. <https://doi.org/10.61996/law.v1i1.15>.
- Rajamaki, Jyri, Jutta Tervahartiala, Sofia Tervola, Sari Johansson, Leila Ovaska, and Paresh Rathod. "How Transparency Improves the Control of Law Enforcement Authorities' Activities?" In *2012 European Intelligence and Security Informatics Conference*, 14–21. IEEE, 2012. <https://doi.org/10.1109/EISIC.2012.35>.
- Rizkiana, Rina Elsa, and Michael Gerry. "The Implementation of Good Governance Concept In Letter Evidence Submission Regulation For E-Litigation Cases." *Veteran Law Review* 6, no. 1 (May 30, 2023): 48–60. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i1.4843>.
- Rozi, Muhammad Fachrur. "ANALYSIS OF THE FUNCTION OF THE PROSPERITY'S COMMISSION IN SUPERVISING THE BEHAVIOR OF PROSPECTORS IN INDONESIA." *NOMOI Law Review* 4, no. 1 (May 30, 2023): 128–41. <https://doi.org/10.30596/nomoi.v4i1.14948>.
- Runtuuwu, Yoan Barbara, and Indra Tjahyadi. "Promoting Economic, Social, and Cultural Rights: Challenges and Opportunities in International Human Rights Law." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1, no. 03 (June 30, 2023): 158–65. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.92>.
- Saputra, Gregorius Hari. "ANALISIS YURDIS PUTUSAN NO.101/Pid.B/2014/PN Rap TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." *College Student Journal*, June 30, 2023. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.860>.
- Sapp, Karla. "Policy Reform: Rethinking Criminal Justice," 53–66, 2024. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-50678-9\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-031-50678-9_4).
- Septiyanto, AKBP. Nur Ichsan Dwi, Bambang Slamet Riyadi, Choirul Saleh, Ir. Agus Hermanto MM, and S.Sos. M.Si DPA, Wike. "Developing Policy and Regulation Using Collaborative Governance to Enhance Democratic Policing." *International Journal of Religion* 5, no. 11 (June 13, 2024): 742–60. <https://doi.org/10.61707/g76rtz26>.
- Shahid, Ramisha. "Fair Trials and Victim Reparations: Improving Judicial Oversight," June 11, 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/u984w>.

- Sidhu, Shawn S., Olivia S. Shadid, Gabrielle L. Shapiro, and Naweed Hayat. "Advocacy in Action: An Interactive Workshop on Providing Asylum Evaluations for Children and Families Fleeing Torture and Persecution." *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry* 62, no. 10 (October 2023): S416. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2023.07.954>.
- Sunaryo, Topan Oddye Prastyo, Idzam Fautanu, Atma Suganda, and Maryano. "Legal Certainty Advocate Organizational System Arrangements in the Implementation of Professional Quality with the Value of Justice." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 2 (May 14, 2024): e5762. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n2-115>.
- THALLURU PADMAJA. "Criminal Justice System in India." *International Journal For Multidisciplinary Research* 5, no. 5 (October 17, 2023). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i05.7590>.
- Whitsel, Laurie P., Sally Honeycutt, Reyna Radcliffe, Janay Johnson, Paul J. Chase, and Philip Noyes. "Policy Implementation and Outcome Evaluation: Establishing a Framework and Expanding Capacity for Advocacy Organizations to Assess the Impact of Their Work in Public Policy." *Health Research Policy and Systems* 22, no. 1 (February 20, 2024): 27. <https://doi.org/10.1186/s12961-024-01110-0>.